

Ikhwan Alfiansyah, S.St.Pi, M.P., M.Si.



INOVASI PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN



Editor:

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

INOVASI PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

Ikhwan Alfiansyah, S.St.Pi, M.P., M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

INOVASI PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

Penulis:

Ikhwan Alfiansyah, S.St.Pi, M.P., M.Si.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Adi Nugroho Susanto Putro, S.Kom., M.T.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 69, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-323-3

Cetakan Pertama:

Februari 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Inovasi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Buku ini terdiri dari 5 Bab, ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Konsep Dasar Dan Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan

Bab II Aspek Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Bab III Evaluasi Perencanaan Inovatif Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Bab IV Permasalahan Dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Bab V Kebijakan dan Kearifan Tradisional Dalam Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Seperti peribahasa *“Tiada Gading yang Tak Retak”*, buku ini walaupun sudah ditulis semaksimal mungkin tetapi pasti masih ada kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Daftar Isi	v
Bab I Konsep Dasar Dan Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan	
A. Pengenalan Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.....	3
B. Teori-Teori Utama Yang Mendasari Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.....	6
C. Hubungan Antara Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Dengan Pembangunan Berkelanjutan.....	10
Daftar Pustaka	14
Bab II Aspek Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	
A. Ekonomi.....	17
B. Manajemen	19
C. Sumberdaya.....	21
D. Sosial Budaya.....	21
E. Kelembagaan.....	22
F. Politik.....	23
G. Tata Ruang	25
Daftar Pustaka	28
Bab III Evaluasi Perencanaan Inovatif Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	
A. Metode Identifikasi Perencanaan dan Kebijakan Inovatif.....	29
B. Analisis dan Evaluasi Terhadap Berbagai Model Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.....	33
C. Studi Kasus Mengenai Karya Inovatif Dalam Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	38
Daftar Pustaka	42
Bab IV Permasalahan Dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	
A. Permasalahan Umum Dalam Perencanaan Wilayah dan Pedesaan	43

B. Pendekatan Inovatif Untuk Menanggulangi Permasalahan Dalam Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	49
Daftar Pustaka	55
Bab V Kebijakan dan Kearifan Tradisional Dalam Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	
A. Kebijakan Tradisional dan Perannya Dalam Pembangunan.....	56
B. Integrasi Kebijakan dan Kearifan Tradisional Dalam Konteks Pembangunan Wilayah dan Pedesaan	60
C. Rekomendasi Konstruktif Untuk Mengakomodasi Kebijakan dan Kearifan Tradisional	63
Daftar Pustaka	68
Profil Penulis.....	69

BAB I

KONSEP DASAR DAN TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

Di Indonesia, secara umum tingkat kemiskinan lebih sering terjadi di wilayah pedesaan. Situasi ini cukup ironis karena di pedesaan terdapat kekayaan alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumber daya desa mencakup beragam aspek, termasuk sumber daya fisik, sosial, penduduk, dan budaya, yang seharusnya dapat menjadi fondasi untuk pembangunan. Namun sayangnya, tidak semua potensi sumber daya desa dapat dimanfaatkan sepenuhnya, dan daya dukung sumber daya desa terbatas dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan.

Tidak mengherankan jika perkembangan pesat dalam sektor pembangunan wilayah dan pedesaan di Indonesia telah menciptakan tantangan baru. Urbanisasi yang pesat, transformasi ekonomi, dan perubahan sosial dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara perkembangan kota dan pedesaan.

Adanya ketidakmerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat menciptakan disparitas ekonomi dan sosial. Peningkatan ketidaksetaraan ini bisa menjadi salah satu fokus perencanaan pembangunan untuk mencapai keberlanjutan dan inklusivitas (Soekartawi, 2010).

Oleh sebab itu diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui beragam program pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan potensi desa. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting dalam setiap tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. Terutama dalam konteks perencanaan pembangunan, sebaiknya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah diimplementasikan melalui pendekatan perencanaan dari bawah (Bottom-Up Planning), sehingga masyarakat memiliki peran dalam merancang masa depan mereka sendiri (Ariadi, 2019).

A. PENGENALAN KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

Pembangunan wilayah dan perdesaan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dasar perencanaan menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan (Firman & Surbakti, 2019).

Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom dan berotonomi asli. Hal ini tercermin dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Kemandirian desa dalam pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan mencerminkan komitmen untuk membangun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus masyarakat desa. Dengan demikian, desa memiliki fleksibilitas untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika lokal. Keberagaman budaya, adat istiadat, dan

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2).
- Firman, T., & Surbakti, I. (2019). *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Kencana.
- Hardi, P., & Suhardiman, D. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. PT Gramedia.
- Mubyarto. (2008). *Pembangunan Desa dan Kota: Menuju Pemerataan dan Keberlanjutan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Soekartawi, A. (2010). *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksara.

BAB II

ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotongroyong. Pembangunan pedesaan ini dijabarkan dalam berbagai program pembangunan pedesaan yang melingkupi berbagai aspek (Mubyarto & Kartodirdjo, 1988).

Ada 3 aspek (dimensi) dasar dalam pembangunan pedesaan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi politik. Dimensi ekonomi mencakup penyediaan kapasitas dan peluang bagi masyarakat miskin serta berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat dari proses pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga mengurangi ketidakmerataan pendapatan, baik intra maupun antar sektor. Dimensi sosial mendukung pembangunan sosial masyarakat desa yang kurang beruntung dan menyediakan

jaring pengaman sosial. Dimensi politik memperbaiki peluang masyarakat miskin dan berpendapatan rendah untuk berpartisipasi secara efektif dan setara dalam proses politik di tingkat desa (Nimal A. Fernando, 2008).

Konsep-konsep dasar yang mendukung perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan.

1. Tata Ruang

Konsep tata ruang menekankan pada pengaturan dan penataan ruang secara efisien dan berkelanjutan¹. Dengan menetapkan fungsi-fungsi khusus bagi setiap zona, seperti zona industri, pemukiman, dan pertanian, perencanaan tata ruang membentuk dasar bagi pembagian sumber daya dan pertumbuhan wilayah yang seimbang.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Prinsip pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap alam². Hal ini mencakup penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi air, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diarahkan untuk memberikan manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan yang sukses. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi¹. Pendekatan dari bawah ini menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan mendukung pemberdayaan masyarakat lokal.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan². Upaya pembangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhitungkan kepentingan generasi mendatang. Konsep ini menciptakan landasan untuk pembangunan yang memberikan dampak positif jangka panjang.

A. EKONOMI

Implementasi pembangunan dalam bidang ekonomi meliputi (Graha, 2009) :

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.497>
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan masyarakat pembangunan melalui pendampingan sosial dalam konsep pemberdayaan di bidang ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117–126.
- Mubyarto, & Kartodirdjo. (1988). *Pengembangan Desa: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. PT Gramedia.
- Nimal A. Fernando. (2008). *Introduction to Development Studies*. M.D. Gunasena & Co. Ltd.
- Sumardjono, M. S. (2013). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Pustaka Pelajar.
- Teguh Prihanto. (2010). Perubahan Spasial dan Sosial-Budaya Sebagai Dampak Megaurban di Daerah Pinggiran Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 12(1), 131–140. www.semarang.go.id
- United Nations Development Programme. (2006). Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results. In *Management Development and Governance Division Bureau for Development Policy*.

BAB III

EVALUASI PERENCANAAN INOVATIF DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

A. METODE IDENTIFIKASI PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN INOVATIF

Perubahan dalam paradigma pembangunan telah bergeser dari penekanan pada indikator kuantitatif menuju menciptakan keseimbangan dengan indikator kualitatif. Kegagalan pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan telah mendorong terbentuknya paradigma baru yang meyakini bahwa pembangunan harus mengarah pada pencapaian kesetaraan (equity), pertumbuhan (eficiency), dan keberlanjutan (sustainability) yang seimbang dalam pembangunan ekonomi.

Perubahan prinsip hanya pada pertumbuhan menjadi penekanan pada pemerataan, pertumbuhan, dan keberlanjutan menjadi sangat penting dalam pengembangan desa saat ini.

Pembangunan harus dipandang sebagai proses yang melibatkan berbagai perubahan esensial dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional, sambil tetap mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang bekerja sama. Pembangunan desa merupakan respons terhadap tiga lingkungan desa (alam, budaya, dan sosial-ekonomi, yang harus dipertimbangkan secara tepat dalam proses pembangunan.

Tujuan inti dari pembangunan tidak hanya meliputi pertumbuhan, tetapi juga termasuk dalam pemerataan serta keberlanjutan. Pemerataan ini mencakup distribusi yang merata baik dalam hal wilayah geografis, sektor-sektor tertentu, maupun kelompok penerima manfaat pembangunan, dan menjadi tolok ukur penting dari keberhasilan proses pembangunan. Keberlanjutan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kesinambungan sumber daya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi-generasi mendatang (Suharyanto & Sofianto, 2012).

Karakteristik desa ditandai oleh beragam potensi lokal yang dimiliki serta dukungan masyarakat yang masih mengutamakan nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan partisipatif. Modal sosial ini, yang meliputi kepercayaan, toleransi, dan

gotong royong, memainkan peran yang sangat vital dalam memajukan pembangunan di wilayah pedesaan. Implementasi modal sosial, yang mencakup segala bentuk kerjasama dalam masyarakat atau bangsa untuk meningkatkan taraf hidup, bergantung pada nilai-nilai dan norma yang menjadi inti seperti kepercayaan, keseimbangan, dan peraturan bersama. Untuk mewujudkannya, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna memperkuat modal sosial di pedesaan melalui kolaborasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian akan terdiri dari tiga fase, yakni fase permulaan, fase inti, dan fase akhir. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap tahap kegiatan tersebut (Ahmad Sururi & Rahmi Mulyasih, 2017) :

1. Tahap awal serangkaian kegiatan yang mencakup beberapa tahap :
 - a. pengamatan partisipatif dan survei, yang bertujuan sebagai analisis awal untuk memperoleh informasi mendalam mengenai masalah yang dihadapi di desa dan mencari solusi yang sesuai dan tepat.
 - b. pemetaan wilayah desa.
 - c. penyusunan administrasi sebagai langkah formal untuk melegalisasi kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2021). *7 Contoh Program Inovasi Desa Untuk Desa Semakin Sejahtera*. Digitaldesa.Id.
- Ahmad Sururi, & Rahmi Mulyasih. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan berbasis 4R (Rembug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 218–238. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.17>
- Andari, R. N., & Ella, S. (2019). Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 41–58. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>
- Pranoto, S., Ma'arif, M. S., H.Sutjahjo, S., & Siregar, H. (2004). *Pembangunan perdesaan berkelanjutan melalui model pengembangan agropolitan. 1997*.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Wibisono, N., Setiawati, L., & Putri, S. R. S. U. (2020). Model Pengembangan Destinasi Pariwisata Pedesaan Studi Kasus: Desa Wisata Gambung Mekarsari. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 34–43. <https://doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1568>

BAB IV

PERMASALAHAN DALAM PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

A. PERMASALAHAN UMUM DALAM PERENCANAAN WILAYAH DAN PEDESAAN

Secara garis besar, tantangan-tantangan dalam upaya pembangunan desa dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat pedesaan

Rendahnya tingkat kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat pedesaan sering kali menjadi perhatian utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi sebuah negara. Kondisi ini umumnya terbentuk karena akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai, serta kesenjangan ekonomi yang

signifikan jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan (De Janvry & Sadoulet, 2001).

2. Keterbatasan sarana serta infrastruktur fisik dan non-fisik di wilayah desa dan sekitarnya yang masih belum memadai.

Di sisi non-fisik, pendidikan dan layanan kesehatan sering kali terbatas dan kurang optimal. Akses terhadap informasi dan teknologi sering kali terhambat di pedesaan, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, keterbatasan dalam pembangunan kapasitas lokal dan kurangnya dukungan dari pemerintah dapat memperparah kondisi tersebut (Sumodiningrat & Widodo, 2017).

3. Kurang optimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal di desa karena minimnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, serta pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Pengembangan potensi ekonomi lokal di desa sering kali menghadapi kendala serius karena minimnya akses dan kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, sarana transportasi, dan akses internet. Keterbatasan modal menjadi penghalang utama bagi para pelaku usaha di desa untuk meningkatkan produksi, memperbaiki teknologi produksi, atau bahkan melakukan inovasi dalam pengolahan

produk mereka. Situasi ini mengakibatkan kurangnya daya saing produk desa di pasar yang lebih luas. Lebih jauh lagi, minimnya akses dan modal juga dapat menghambat upaya masyarakat desa untuk mendapatkan informasi pasar yang diperlukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk mereka dengan strategi yang lebih efektif (Rahman & Hashim, 2019).

4. Lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat kemajuan daerah tertinggal.

Fenomena ini umumnya disebabkan oleh beragam faktor, mulai dari perbedaan visi dan misi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, hingga lembaga donor atau bantuan internasional. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pelaku pembangunan seringkali mengakibatkan tumpang tindih program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta implementasi kebijakan yang tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, kebingungan di antara masyarakat, dan pemborosan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan.

5. Konflik Lahan

Kesulitan dalam transformasi penggunaan lahan dalam skala besar dan kecil, baik secara lokal maupun global, merupakan

DAFTAR PUSTAKA

- De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2001). Rural Poverty in Developing Countries: Issues and Policies. *International Food Policy Research Institute (IFPRI)*.
- Dr. Ir. Rupa Matheus, M. S. (2022). *Analisis Potensi Wilayah Pedesaan : Pendekatan Efektif Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Andi.
- Kitamura, T., & Rustiadi, E. (2016). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *ResearchGate, March, 3*. https://www.researchgate.net/publication/265284147_Alih_Fungsi_Lahan_Dalam_Perspektif_Lingkungan_Perdesaan
- Paulus Rudolf Yuniarto. (2022). Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 07(25)*. <https://doi.org/10.1080/09614524.2011.543273>
- Rahman, N. A. A., & Hashim, F. (2019). Enhancing Rural Economic Development through Rural Tourism Initiatives: A Case of Malaysia. *GeoJournal of Tourism and Geosites, 27(3)*, 898–910.
- Sumodiningrat, G., & Widodo, T. (2017). Keterbatasan Infrastruktur Fisik dan Non-Fisik di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Pedesaan, 1(1)*, 45–56.

BAB V

KEBIJAKAN DAN KEARIFAN TRADISIONAL DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN

A. KEBIJAKAN TRADISIONAL DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN

Di banyak negara berkembang, daerah pedesaan umumnya memiliki lahan yang terbatas, modal yang terbatas, tetapi memiliki jumlah tenaga kerja yang berlimpah. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab mengapa pembangunan di pedesaan tidak memenuhi harapan. Pembangunan pertanian dan pedesaan di negara-negara berkembang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan pendapatan, produksi, dan produktivitas warga desa. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang mendukung pembangunan di daerah pedesaan (Fikriman, 2017).

Salah satunya adalah program Desa Siaga adalah suatu inisiatif yang bertujuan menciptakan kondisi di tingkat desa di mana masyarakat memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi masalah yang ada, membuat rencana, dan menyelesaikannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi isu-isu kesehatan, bencana, dan keadaan darurat dengan cara yang independen. Hal ini diharapkan dapat menciptakan desa yang sehat dan mampu mandiri dalam mengatasi tantangan yang artinya :

1. Memperluas pemahaman dan kesadaran warga desa akan pentingnya menjaga kesehatan.

Melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendekatan komunitas, informasi mengenai pola makan sehat, pentingnya olahraga teratur, serta upaya pencegahan penyakit menjadi terjangkau dan dapat diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tidak hanya menguntungkan individu secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan keseluruhan di lingkungan desa.

2. Meningkatkan kewaspadaan serta persiapan masyarakat desa terhadap potensi risiko dan ancaman yang dapat mengganggu kesehatan.

Dengan melibatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai ancaman yang mungkin dihadapi, seperti penyakit menular, bencana alam, atau krisis kesehatan global. Masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan pertolongan pertama, dan pembangunan sistem peringatan dini. Selain itu, menggalakkan praktek kesehatan yang baik, seperti mencuci tangan secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan mendorong vaksinasi, juga kunci dalam memitigasi risiko yang dapat mengganggu kesehatan di tingkat desa. Dengan upaya ini, masyarakat desa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi ancaman kesehatan potensial dan mengurangi dampak negatifnya.

3. Mendorong keluarga agar memiliki kesadaran akan gizi yang sehat dan menerapkan gaya hidup bersih dan sehat.

Dengan menyediakan informasi tentang makanan bergizi, memasak bersama untuk mengajarkan pola makan sehat, dan menciptakan kebiasaan dalam rutinitas harian, seperti olahraga rutin dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikriman. (2017). Jurnal Agri Sains. *Transformasi Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*, 1(02), 1–11. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JAS/article/view/151/251>
- Nuring Septyasa Laksana. (2013). Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakan Dan Mnanajemen Publik*, 1(1).
- Saeful Bachrein. (2010). Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan Developing Village Approach in West Java. *Rural Development Policy and Strategi*, *IAARD E-Journal*, 8(2), 133–149.
- Suharto, E. (2008). *Kearifan lokal dan pembangunan: pengalaman dari Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Suryadi, K. (2023). Kebijakan Publik dan Kearifan Lokal: Integrasi dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 45–58.

PROFIL PENULIS



Ikhwan Alfiansyah lahir pada tanggal 27 Juli 1987 di Blangkejeren (Kabupaten Gayo Lues), sering disapa juga sebagai iwan. Anak dari ayah yang bernama H. Alpahsam dan ibu bernama Aslinah, mempunyai seorang istri bernama dr. Sri Agusti, M.Ked(KJ) juga mempunyai seorang putri bernama Idzkira Makhriza Ramadhanty.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulo Kiton Bireuen dan lulus pada tahun 1999, penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPN 6 Bireuen dan lulus pada tahun 2002. Selanjutnya penulis bersekolah di SMUN 2 Bireuen dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis mencoba masuk ke sekolah kedinasan dan diterima pada tahun tersebut di Sekolah Tinggi Perikanan di bawah naungan Departemen Kelautan dan Perikanan(sekarang KKP) dan lulus pada tahun 2009. Setelah lulus penulis mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi CPNS dan lulus pada tahun 2010, dan saat ini penulis bekerja di Bappeda Gayo Lues. Berbekal surat tugas belajar, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Pascasarjana USU jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dan lulus di tahun 2022.



Buku "Inovasi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan" menyajikan pandangan menyeluruh terkait perencanaan pembangunan, mulai dari konsep dasar hingga implementasi inovatif. Bab awal membahas konsep dasar dan teori perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan, memberikan dasar pemahaman yang kokoh. Bab berikutnya menggali integrasi aspek-aspek kunci seperti ekonomi, manajemen, sumber daya, sosial budaya, kelembagaan, politik, dan tata ruang, dengan studi kasus untuk mengilustrasikan keberhasilan integrasi ini.

Bab-bab selanjutnya mengeksplorasi identifikasi, analisis, dan evaluasi perencanaan inovatif serta permasalahan yang mungkin muncul. Pembaca diajak melihat pendekatan interelasi, interaksi, dan interdependensi antar lima pilar pembangunan, memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas hubungan antar aspek fisik-biologi lingkungan, ekonomi, manajemen, sosial budaya, kelembagaan, politik, dan tata ruang. Penutup buku memberikan sintesis dari pembahasan tersebut dan mendorong pembaca untuk terus mengembangkan ide-ide inovatif guna mendukung pembangunan berkelanjutan. "Inovasi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan" adalah panduan komprehensif bagi pembaca yang ingin mendalami dan menerapkan konsep-konsep inovatif dalam konteks perencanaan pembangunan yang lebih holistik dan berkelanjutan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996



ISBN 978-623-147-323-3 (PDF)

9 786231 473233